

Analisis Kinerja Keuangan Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Wediya Puteri*, Chairul Sa'roni

Program Studi Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat
[*29wediyaputeri@gmail.com](mailto:29wediyaputeri@gmail.com)

Abstract

The purpose of this research is to find out the Regional financial performance in the implementation of regional autonomy in the Hulu Sungai Utara Regency. Data analyzed in the form of Realization of Regional Revenue and Expenditure Budget of Hulu Sungai Utara Regency measured by regional financial ratios include: regional independence ration and relationship patterns, fiscal decentralization degree ratio, effectiveness and efficiency ratio, income growth and relationship pattern.

The result of the ratio analysis in this study can be seen that the Hulu Sungai Utara Regency for Independence is still not able to carry out regional autonomy for the level of PAD capability is still low and effeciciency is still lacking and even though the effectiveness is effective and the growth has also been positive.

Keyword : Regional Autonomy, Independence, DDF, Effectiveness, Efficiency, Revenue Growth

Abstaksi

Tujuan dilakukan penelitian ini yaitu untuk mengetahui kinerja keuangan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Data yang dianalisis berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara yang diukur dengan rasio keuangan daerah antara lain : rasi kemandirian daerah dan pola hubungannya, rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio efektivitas dan efisiensi, rasio pertumbuhan pendapatan beserta pola hubungannya.

Hasil analisis rasio pada penelitian ini dapat diketahui bahwa Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk kemandiriannya masih belum mampu melaksanakan otonomi daerah untuk tingkat kemampuan PAD masih rendah dan efisiensinya masih kurang dan meskipun efektivitasnya sudah efektif dan pertumbuhannya juga sudah positif.

Kata Kunci : Otonomi Daerah, Kemandirian, DDF, Efektivitas, Efisiensi, Pertumbuhan Pendapatan, HSU

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pengelolaan otonomi daerah didasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Sumber-sumber keuangan daerah yang ada disetiap urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah akan menjadi sumber keuangan daerah. Sehingga daerah perlu teliti dalam mengontrol dan mengoptimalkan dalam memanfaatkan potensi yang ada pada suatu daerah sebagai pendapatan daerah

Pembangunan ekonomi nasional untuk dapat berdaya saing dengan kehidupan yang lebih baik pada masyarakat daerah maka diberikanlah otonomi daerah kepada pemerintah daerah. Otonomi daerah tersebut dilaksanakan dengan prinsip-prinsip dasar yaitu luas, nyata dan bertanggung jawab. Dari asas tersebut kesejahteraan masyarakat daerah dapat dipercepat dengan dilaksanakannya otonomi daerah. Tujuan utama otonomi daerah adalah mensejahterakan masyarakat (Prihatiningsih, 2010).

Menurut Abdul Halim (2004) ciri-ciri utama pada daerah yang mampu berotonomi terlihat pada pengelolaan keuangan daerahnya berupa kemampuan keuangan daerah dimana daerah otonomi memiliki kewenangan dan kemampuan maksimal dalam mencari sumber-sumber keuangan pribadi dan ketergantungan pada pemerintah pusat harus dapat seminimal mungkin untuk dikurangi walaupun mustahil untuk ditiadakan. Berikut tabel realisasi APBD kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012-2017.

Berikut ini adalah tabel realisasi APBD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012-2017 :

Tabel 1
Realisasi APBD Tahun 2012-2017
(Dalam Rupiah)

Tahun	Pendapatan Daerah	Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Transfer	Belanja Daerah
2012	744.540.734.786,74	33.100.013.420,34	655.581.491.264,00	652.575.232.441,00
2013	823.392.658.813,61	45.728.640.167,91	713.207.385.438,00	701.803.857.584,00
2014	912.873.911.879,85	92.003.509.511,35	769.195.454.181,00	831.031.945.977,70
2015	1.108.140.034.868,67	100.606.487.787,67	956.362.701.091,00	1.096.539.884.203,16
2016	1.205.304.880.763,53	95.440.232.946,53	1.103.797.214.867,00	1.308.037.433.406,00
2017	1.082.545.967.503,19	131.597.974.168,19	946.288.677.125,00	1.125.469.401.993,90

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah HSU

Berdasarkan tabel 1 tersebut menunjukkan realisasi APBD Kabupaten Hulu Sungai utara tahun 2012-2017 secara keseluruhan umumnya cenderung mengalami peningkatan disetiap tahunnya, akan tetapi pada tahun 2017 pendapatan daerah mengalami penurunan sebesar Rp. 122.758.914 hal ini dikarenakan efektivitasnya mengalami penurunan, sama halnya dengan pendapatan transfer pada tahun 2017 mengalami penurunan sebesar Rp. 205.313.624 karena menurunnya dana perimbangan, begitu juga pada belanja daerah mulai tahun 2012-2016 mengalami peningkatan hanya saja pada tahun 2017 mengalami penurunan juga sebesar Rp. 182.568.032. pada PAD mulai tahun 2012-2015 mengalami peningkatan tetapi turun pada tahun 2016 dan pada tahun 2017 kembali mengalami peningkatan.

Menurut halim (2008) kinerja keuangan daerah adalah suatu ukuran melihat kemampuan keuangan dan keberhasilan dalam pengelolaan keuangan daerah untuk menjalankan otonomi daerah. berupa rasio keuangan. **Rumusan Masalah:** 1. Bagaimana kemandirian kinerja keuangan daerah di Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam pelaksanaan otonomi daerah diukur dengan rasio kemandirian daerah dan pola hubungannya ? 2. Bagaimana kemampuan keuangan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Hulu Sungai Utara jika diukur dengan analisis derajat desentralisasi fiskal, rasio efektivitas dan efisiensi, rasio pertumbuhan pendapatan dan pola hubungannya ? **Tujuan Penelitian :** 1. Untuk menganalisis dan mengetahui kinerja keuangan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Hulu Sungai Utara yang diukur dengan rasio kemandirian daerah. 2. Untuk menganalisis dan mengetahui kinerja keuangan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Hulu Sungai Utara yang diukur dengan rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio efektivitas dan efisiensi, rasio pertumbuhan pendapatan beserta pola hubungannya.

KAJIAN PUSTAKA

Pengertian Otonomi daerah

Vincent Lemius (1986) menyatakan bahwa pengambilan keputusan politik maupun administrasi pengambilan bagi tercapainya kebebasan harus menghormati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun kebebasan untuk apa yang akan menjadi kebutuhan daerah, tapi dalam kebutuhan daerah selalu disesuaikan dengan kepentingan umum, dan ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (Sujarweni, 2015).

Pengertian Keuangan Daerah

Keuangan daerah yaitu hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat diukur dengan uang termasuk didalamnya semua bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Demikian pula segala sesuatu baik berupa uang ataupun barang yang bisa dijadikan kekayaan suatu daerah yang sepanjang belum dikuasai oleh negara. Keuangan daerah merupakan instrumen yang sangat penting dalam otonomi daerah sebab dari keuangan daerah dapat mencerminkan kemampuan daerah untuk bisa mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi (Putra, 2018).

Pengertian Kinerja Keuangan Daerah

Kinerja keuangan merupakan suatu ukuran keuangan untuk mengukur kinerja menggunakan indikator-indikator keuangan tertentu. Tujuan pengukuran kinerja keuangan daerah menggunakan analisis kinerja keuangan daerah yaitu memperoleh posisi keuangan yang mewakili suatu kenyataan pada entitas dan potensi kinerja tersebut, kemudian analisis tersebut menggunakan rasio-rasio keuangan pada laporan APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan (Halim, 2008).

Menurut (Mardiasmo, 2002) tujuan dari pengukuran kinerja dalam mengelola keuangan daerah ialah untuk memenuhi tiga maksud yaitu :

1. Memperbaiki kinerja pemerintahan, ukuran kinerja yang membantu pemerintah fokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja.
2. Mendistribusikan pembuatan keputusan juga sumber daya
3. Memperbaiki hubungan kelembagaan, mewujudkan pertanggungjawaban publik.

Menurut (Putra, 2018), penilaian kinerja pemerintah daerah berbeda jauh dengan penilaian kinerja perusahaan karena selain berbasis anggaran, juga tidak dimaksudkan untuk mencari profit atau keuntungan.

Pengertian Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah

Anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) yaitu suatu rencana keuangan tahunan daerah yang disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD yang ditetapkan dengan peraturan daerah yang terdapat dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

R.A Chalit dalam (Putra, 2018) menyatakan APBD adalah bentuk kongkrit rencana keuangan daerah bersifat komprehensif dan mengaitkan pemasukan juga

pengeluaran berupa uang, supaya dapat capai target yang ditetapkan pada periode tertentu dalam tahun anggaran.

APBD disusun menggunakan pendekatan kinerja yaitu dengan memprioritaskan keluaran dari hasil kinerja dan pemasukan berupa input-input sumber daya yang ada sehingga menghasilkan perkiraan terukur dalam penyusunan APBD agar penerimaan pendapatan dapat tercapai atau terpenuhi dan jumlah belanja yang dianggarkan dapat ditetapkan sesuai batas kebutuhan(Putra, 2018).

Pengertian Analisis Rasio Keuangan Daerah

Menurut Halim(2007), analisis rasio keuangan yaitu usaha mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan yang ada. Dalam menganalisis laporan keuangan daerah digunakan analisis rasio keuangan pada laporan tersebut. Menurut Halim (2008) cara yang dilakukan untuk mengukur kinerja pemerintahan untuk mengelola keuangan daerahnya yaitu menggunakan alat analisis rasio keuangan yang sudah dipertanggung jawabkan oleh pemerintah daerah.

Penelitian Terdahulu

Ana Prihatiningsih (2010) menunjukkan hasil penelitiannya pada keuangan daerah di kota Surakarta secara deskriptif antara tahun 2003-2008, pendapatan daerah tersebut mengalami kenaikan, sedangkan hasil analisisnya secara kuantitatif menunjukkan masih belum mampu secara keuangan.

Juhar Latifah (2017) pada hasil penelitiannya menunjukkan bahwa berdasarkan rasio derajat desentralisasi fiskal di Kabupaten Tapin cukup mampu, kemandirian keuangan daerahnya sedikit lebih mampu, dan berdasarkan efektifitas sudah efektif dan efisiensi masih berfluktuasi dan pertumbuhannya masih negatif.

Lazyra KS (2016) pada hasil penelitian menunjukkan kota medan kinerja keuangan daerahnya mengalami penurunan dari hasil penggunaan rasio keuangan daerah terlihat dari kurang maksimalnya pendapatan daerah, rasio kemandirian masih rendah, dan rasio efektivitas masih belum efektif dan rasio efisiensinya sudah efisien.

Metode Penelitian

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi penelitian ini adalah pencatatan, mengumpulkan kemudian mempelajari data dari laporan keuangan daerah berupa LRA APBD Kabupaten Hulu Sungai Utara antara tahun 2012-2017 yang diperlukan oleh peneliti dan juga sebagai pendukung dengan wawancara yaitu memperoleh informasi dengan cara bertanya langsung kepada pihak yang bersangkutan tentang keuangan daerah.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif berupa perhitungan-perhitungan rasio keuangan daerah meliputi rasio kemandirian, rasio efektivitas dan efisiensi juga rasio pertumbuhan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Rasio Kemandirian Daerah

Tabel 2
Analisis Rasio Kemandirian Daerah PAD Murni

Tahun	Realisasi PAD Murni (Rp)	Pendapatan Transfer (Rp)	Rasio Kemandirian	Pola Hubungan
2012	33.100.013.420,34	655.581.491.264,00	5%	Instruktif
2013	45.728.640.167,91	713.207.385.438,00	6%	Instruktif
2014	92.003.509.511,35	769.195.454.181,00	12%	Instruktif
2015	100.606.487.787,67	956.362.701.091,00	10%	Instruktif
2016	95.440.232.946,53	1.103.797.214.867,00	9%	Instruktif
2017	131.597.974.168,19	946.288.677.125,00	14%	Instruktif
	Rata-rata		9,3%	Instruktif

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten HSU (*data diolah*)

Dari uraian diatas terlihat bahwa kemandirian daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2012-2017 tersebut terlihat hasil rasio tertinggi pada tahun 2017 yaitu dengan presentase 14% dari PAD sebesar Rp. 131. 597.974.168,19 dengan pendapatan transfer yang didapat sebesar Rp. 946.288.677.125,00 . hasil rasio terendah ada pada tahun 2012 yaitu presentasinya 5% dari PAD sebesar Rp. 33.100.013.420,34 dengan pendapatan trasfer sebesar Rp. 655.581.491.264,00. Dalam mencukupi kebutuhan pembiayaan kegiatan-kegiatan pemerintahan, pelayanan masyarakat dan pembangunannya masih rendah dan masih berfluktuasi disetiap tahunnya jika dirata-ratakan nilai presentase rasio kemandirian menggambarkan daerah sebesar 9,3%.

Sedangkan dibandingkan pehitungan diatas tersebut maka dengan menggunakan PAD Bagi Hasil pada tabel 3 menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel 3
Analisis Rasio Kemandirian Daerah PAD Bagi Hasil

Tahun	Realisasi PAD Bagi Hasil (Rp)	Pendapatan Transfer (Rp)	Rasio Kemandirian	Pola Hubungan
2012	210.522.984.264,00	655.581.491.264,00	32%	Konsultif
2013	178.656.482.938,00	713.207.385.438,00	25%	Konsultif
2014	180.888.725.181,00	769.195.454.181,00	24%	Instruktif
2015	204.419.762.055,00	956.362.701.091,00	21%	Instruktif
2016	206.696.032.966,00	1.103.797.214.867,00	19%	Instruktif
2017	145.583.651.015,00	946.288.677.125,00	15%	Instruktif
	Rata-rata		23%	Instruktif

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten HSU (*data diolah*)

Dari uraian diatas terlihat rasio kemandirian daerah pada PAD Bagi Hasil yang tertinggi ada pada tahun 2012 yaitu dengan presentase 32% dari PAD bagi hasil angkanya sebesar Rp. 210.522.984.264,00 dengan pendapatan transfer yang diperoleh sebesar Rp. 655.581.491.264,00. Hasil rasio terendah ada pada tahun 2017 dengan presentase 15% PAD bagi hasil yang didapat sebesar Rp. 145.583.651.015,00 dengan hasil pendapatan transfer sebesar Rp. 946.288.677.125,00. Nilai rata-rata PAD Bagi Hasil yaitu 23% maka dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Hulu Sungai Utara berada dalam kemandirian 0-25% artinya masih rendah. Pola hubungan instruktif yang didapat menunjukkan bahwa peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada daerahnya artinya daerah kabupaten Hulu Sungai Utara masih belum mampu secara keuangan. Perlu melakukan sosialisasi secara lebih partisipatif guna mengajak masyarakat agar sadar untuk giat membayar pajak. Salah satu penerimaan pajak yang terus didorong yaitu pajak BPHTB, pajak sarang burung walet, pajak penerangan jalan. Sedangkan beberapa pajak yang perlu ditingkatkan misalnya pajak hotel, pajak air bawah tanah, pajak sarang burung walet. Sehingga apabila hal tersebut dapat berjalan dengan baik maka akan memberikan dampak positif terhadap penerimaan PAD agar lebih mandiri.

2. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Tabel 4
Analisis Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal (RDDF) PAD Murni

Tahun	Realisasi PAD Murni (Rp)	Realisasi Pendapatan Daerah (Rp)	RDDF	Kemampuan keuangan
2012	33.100.013.420,34	744.540.734.786,74	4%	Sangat Kurang
2013	45.728.640.167,91	823.392.658.813,61	6%	Sangat Kurang
2014	92.003.509.511,35	912.873.911.879,85	10%	Sangat Kurang
2015	100.606.487.787,67	1.108.140.034.868,67	9%	Sangat Kurang
2016	95.440.232.946,53	1.205.304.880.763,53	8%	Sangat Kurang
2017	131.597.974.168,19	1.082.545.967.503,19	12%	Kurang
	Rata-rata		8,15%	Sangat Kurang

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten HSU (*data diolah*)

Dari hasil perhitungan tabel 4 diatas pada tahun 2012 yaitu sebesar 4%, pada tahun 2013 rasionya sebesar 6%, pada tahun 2014 meningkat menjadi 10%, ditahun 2015 turun menjadi 9%, dan pada tahun 2016 turun lagi menjadi 8%, dari tahun 2012-2016 masuk kriteria sangat kurang, tetapi pada tahun 2017 mengalami kemajuan peningkatan rasio menjadi 12% masuk kriteria sangat kurang atau masih rendah.

Dari paparan diatas dapat diketahui atau dilihat bahwa kinerja keuangan daerah di Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2012-2017 dengan menggunakan analisis rasio derajat desentralisasi fiskal dengan pendapatan asli daerah (PAD) yang digunakan masuk kategori sangat kurang atau masih sangat rendah.

Tabel 5
Analisis Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal (RDDF) PAD Bagi Hasil

Tahun	Realisasi PAD Bagi Hasil (Rp)	Realisasi Pendapatan Daerah (Rp)	RDDF	Kemampuan keuangan
2012	210.522.984.264,00	744.540.734.786,74	28%	Cukup
2013	178.656.482.938,00	823.392.658.813,61	22%	Cukup
2014	180.888.725.181,00	912.873.911.879,85	20%	Kurang
2015	204.419.762.055,00	1.108.140.034.868,67	18%	Kurang
2016	206.696.032.966,00	1.205.304.880.763,53	17%	Kurang
2017	145.583.651.015,00	1.082.545.967.503,19	13%	Kurang
	Rata-rata		20%	Kurang

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten HSU (*data diolah*)

Dari uraian pada Tabel 5 diatas menunjukkan hasil rata-rata presentase sebesar 20% dalam jangka waktu selama enam tahun terakhir ini kabupaten Hulu Sungai Utara berada dalam skala interval 10,01%-20,00% atau bisa diartikan dalam kemampuan keuangan daerahnya kurang. Dalam hal ini PAD sendiri dalam hal berkontribusi masih

rendah menyumbang untuk pendapatan daerah, artinya PAD sendiri belum bisa membantu pemerintah daerah. Upaya yang telah dilakukan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara meningkatkan PAD dari sektor pajak diantaranya yaitu pemberian penghargaan kepada kecamatan yang terbesar dan tercepat melunasi BPHTB serta penghargaan perwakilan wajib pajak individual yang telah membayar BPHTB.

3. Rasio Efektivitas dan Efisiensi

Tabel 6
Analisis Efektivitas PAD Murni

Tahun	Realisasi PAD Murni (Rp)	Anggaran PAD Murni (Rp)	Rasio Efektivitas PAD Murni	Kriteria
2012	33.100.013.420,34	30.747.589.100,00	108%	Efektif
2013	45.728.640.167,91	33.949.888.250,00	135%	Efektif
2014	92.003.509.511,35	63.747.318.067,00	144%	Efektif
2015	100.606.487.787,67	93.911.112.101,85	107%	Efektif
2016	95.440.232.946,53	91.500.000.000,00	104%	Efektif
2017	131.597.974.168,19	122.443.009.300,00	107%	Efektif
Rata-rata			118%	Efektif

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten HSU (*data diolah*)

Dari uraian di tabel 6 diatas hasil rasio efektivitas pada tahun 2012 dengan angka presentase sebesar 108% masuk kategori efektif, sampai tahun 2014 terus mengalami peningkatan presentase, pada tahun 2015 mengalami penurunan presentase menjadi 107% masih masuk kategori efektif dan terus mengalami penurunan sampai tahun 2016, dan pada tahun 2017 kembali mengalami peningkatan presentase menjadi 107%. Didapati hasil rata-rata kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2012-2017 presentase sebesar 118% masuk kedalam kriteria efektif.

Jika dibandingkan dengan menggunakan PAD Bagi Hasil berikut :

Tabel 7
Analisis Rasio Efektivitas PAD Bagi Hasil

Tahun	Realisasi PAD Bagi Hasil (Rp)	Anggaran PAD Bagi Hasil (Rp)	Rasio Efektivitas PAD Bagi Hasil	Kriteria
2012	210.522.984.264,00	161.173.078.777,00	131%	Efektif
2013	178.656.482.938,00	169.031.696.453,00	106%	Efektif
2014	180.888.725.181,00	219.247.089.027,00	83%	Tidak Efektif
2015	204.419.762.055,00	208.152.067.879,00	98%	Tidak Efektif
2016	206.696.032.966,00	155.024.143.711,08	133%	Efektif
2017	145.583.651.015,00	137.937.433.590,55	106%	Efektif
Rata-rata			109%	Efektif

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten HSU (*data diolah*)

Dari uraian tabel 7 tersebut dapat diketahui kinerja keuangan daerah kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2012-2017 dengan analisis efektivitas PAD Bagi Hasil hasil nilai rata-rata diperoleh sebesar 109% masuk dalam kriteria efektif karena angka tersebut melebihi angka yang harus dicapai yaitu lebih dari 100% hal ini menggambarkan kemampuan daerah tersebut semakin baik terutama dalam pengelolaan anggaran serta realisasi yang didapat. Untuk kedepannya upaya yang harus dilakukan yaitu menjaga keefektifitasannya supaya kabupaten Hulu Sungai Utara mampu melakukan anggaran sesuai dengan potensi yang sudah ada.

Tabel 8
Analisis Rasio Efisiensi

Tahun	Realisasi Belanja Daerah (Rp)	Realisasi Pendapatan Daerah (Rp)	Rasio Efisiensi	Kriteria
2012	652.575.232.441,00	744.540.734.786,74	88%	Cukup Efisien
2013	701.803.857.584,00	823.392.658.813,61	85%	Cukup Efisien
2014	831.031.945.977,70	912.873.911.879,85	91%	Kurang Efisien
2015	1.096.539.884.203,16	1.108.140.034.868,67	99%	Kurang Efisien
2016	1.308.037.433.406,00	1.205.304.880.763,53	109%	Tidak Efisien
2017	1.125.469.401.993,90	1.082.545.967.503,19	104%	Tidak Efisien
	Rata-rata		96%	Kurang Efisien

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten HSU (*data diolah*)

Dari uraian di Tabel 8 kabupaten Hulu Sungai Utara dalam kurun waktu enam tahun terakhir dari tahun 2012-2017 berada dalam skala interval antara 80-100% ketas maka bisa dikatakan dalam rasio efisiensi masih berfluktuasi antara cukup efisien, kurang efisien dan kurang efisien dan tidak efisien . Hasil rata-rata presentase rasio efisiensi daerah kabupaten Hulu Sungai Utara dalam kurun waktu enam tahun terakhir ini sebesar 96% berada dalam skala interval antara 80%-100% hasilnya masih kurang efisien. Pemerintah daerah seharusnya dapat menekan laju belanja daerah supaya lebih memperhatikan pendapatan yang direalisasikan agar sesuai dengan pendapatan yang ada untuk biaya belanja daerah.

4. Rasio Pertumbuhan Pendapatan

Tabel 9
Analisis Rasio Pertumbuhan pendapatan

Tahun	Realisasi Pendapatan daerah (Rp)	Rasio Pertumbuhan
2012	744.540.734.786,74	0%
2013	823.392.658.813,61	11%
2014	912.873.911.879,85	11%
2015	1.108.140.034.868,67	21%
2016	1.205.304.880.763,53	9%
2017	1.082.545.967.503,19	-10%
Rata-rata		7%

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten HSU (*data diolah*)

Dari uraian tabel 9 diatas hasil rasio pertumbuhan pendapatan tertinggi ada pada tahun 2015 dengan angka presentase sebesar 21% tumbuh positif dan hasil dari pertumbuhan pendapatan yang terendah ada pada tahun 2017 yaitu dengan presentase -10% tumbuh negatif hal ini disebabkan oleh penurunan pendapatan transfer terutama dari dana perimbangan. jika ditotal rata-rata rasio pertumbuhan pendapatan daerah sebesar 7% dilihat dari perkembangan rasio pertumbuhan dari tahun 2012-2017 mengalami peningkatan maka dapat dikatakan tumbuh dengan positif. Berikut tabel rasio pertumbuhan pendapatan asli daerah :

Tabel 10
Analisis Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah

Tahun	Realisasi PAD (Rp)	Rasio Pertumbuhan
2012	33.100.013.420,34	0%
2013	45.728.640.167,91	38%
2014	92.003.509.511,35	101%
2015	100.606.487.787,67	9%
2016	95.440.232.946,53	-5%
2017	131.597.974.168,19	38%
Rata-rata		30%

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten HSU (*data diolah*)

Dari uraian tabel 10 hasil rasio pertumbuhan pendapatan asli daerah di kabupaten Hulu Sungai Utara yang tertinggi ada pada tahun 2014 dengan angka presentase yaitu 101% tumbuh dengan sangat positif. Hasil rasio pertumbuhan pendapatan

asli daerah yang terendah ada pada tahun 2016 dengan presentase -5% hal ini dikarenakan adanya penurunan target dari pemerintah daerah mengakibatkan pertumbuhan pendapatan asli daerah di tahun 2016 tumbuh negatif. jika dilihat dari perkembangan rasio pertumbuhan pendapatan asli daerah dalam kurun waktu enam tahun dari tahun 2012-2017 mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi yaitu 30% dibandingkan dengan pertumbuhan pendapatan daerah. Hal ini dapat disimpulkan dari hasil rasio pertumbuhan pendapatan pada kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2012-2017 tumbuh dengan positif.

PENUTUP

Implikasi Penelitian

Hasil dari semua rasio keuangan daerah dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk kemandiriannya masih belum mampu menjalankan kegiatan otonomi daerah, jika dilihat dari tingkat kemampuan PAD masih rendah dan efisiensinya masih kurang akan tetapi pada rasio efektivitasnya sudah efektif juga pertumbuhannya sudah tumbuh positif. Maka perlu adanya usaha dan upaya yang lebih lagi untuk bisa mengurangi ketergantungan dari pusat melalui pengoptimalan sumber daya yang dipunyai daerah Hulu Sungai Utara.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini hanya menggunakan rasio kemandirian daerah, rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio efektivitas dan efisiensi, dan rasio pertumbuhan pendapatan sehingga masih memiliki keterbatasan dalam mengukur kinerja keuangan daerah. Dan ruang lingkup yang diteliti hanya di daerah Kabupaten hulu Sungai Utara, sehingga belum bisa melihat secara keseluruhan kemampuan keuangan daerah pemerintah daerah secara lebih luas.

Simpulan

Dari penelitian ini dapat menyimpulkan bahwaberdasarkan rasio-rasio keuangan daerah daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2012-2017 diperoleh dengan membandingkan PAD Murni dan PAD Bagi Hasil dari mulai rasio kemandirian daerah berada dalam skala interval 0-25% menunjukkan pola hubungan instruktif. Rasio derajat

desentralisasi fiskal berada dalam skala interval 00,00%-20,00% menunjukkan kemampuan PAD masih rendah. Rasio efektivitasnya berada dalam kriteria lebih dari > 100% maka dapat dikatakan efektif. Rasio Efektivitasnya ada di skala interval 80%-100% keatas maka hasilnya masih kurang efisien. Dan rasio pertumbuhan tumbuh Positif.

Saran

Pemerintah Hulu Sungai Utara harus menggali potensi yang dapat meningkatkan PAD seperti memperluas basis cakupan pajak daerah. Meningkatkan kegiatan ekonomi di Kabupaten Hulu Sungai Utara menjadi lebih intensip sehingga retribusi yang dipungut daerah menjadi meningkat. Meningkatkan pengembangan inovasi-inovasi pada potensi yang dimiliki daerah Hulu Sungai Utara, seperti pengembangan objek wisata, terutama yaitu candi Agung agar dapat menambah retribusi daerah melalui kunjungan wisata dan peningkatan pajak daerah melalui kegiatan-kegiatan usaha ekonomi di sekitar candi Agung. Mengoptimalkan BUMD agar menjadi lebih efektif dan efisien supaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguasaan sumber daya ekonomi seperti : PDAM. Dan Harus adanya sinergi antara masyarakat, pemerintah daerah dan juga swasta agar terlaksananya pembangunan daerah yang berkesinambungan. Dan pembagian dana bagi hasil yang diterima oleh kabupaten /kota yang diatur dalam Undang-undang nomor 33 tahun 2004 pasal 13 ayat 1,2 dan 3 menyatakan pembagian bagi hasil pph adalah sebesar 20% yang dibagi kepada provinsi dan kabupaten/kota dengan imbangan 60% untuk kabupaten/kota dan 40% untuk provinsi maka bagi pemerintah pusat agar dapat meningkatkan porsi bagian daerah dari 20% menjadi lebih tinggi (naik sekitar 10%) dengan imbangan naik dari 60% menjadi 80% untuk kabupaten/kota dan 20% untuk provinsi. Supaya dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah suatu daerah khususnya di kabupaten Hulu Sungai Utara.

Daftar Referensi

- Halim, A. (2004). *Manajemen Keuangan Daerah* (Edisi Revi). Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Halim, A. (2007). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Selemba Empat.
- Halim, A. (2008). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Selemba Empat.

- KS, L. (2016). *Analisis Rasio Keuangan Daerah Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah di Kota Medan*. Retrieved from <http://balitbang.pemkomedan.go.id/>
- Latifah, J. (2017). *Analisis Kinerja Keuangan Daerah Dalam Menunjang Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kabupaten Tapin*.
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andhi.
- Prihatiningsih, A. (2010). *Analisis Kemampuan Keuangan daerah Dalam pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kota Surakarta*. Retrieved from <https://eprints.uns.ac.id/10143/>
- Putra, W. (2018). *Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Sujarweni, V. W. (2015). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah*. , (2014).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah*. , (2004).